

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN,
TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
(PERIODE TAHUN 2015-2018)**

^{1st} **Salman Alfarizi**, ^{2nd} **Juniarti SE, M.Ak.**
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta
Jl.Bening Indah Rt/Rw: 05/07 No:28 Kel.
Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
salmanalfarizi7979@gmail.com, juniarti@stei.ac.id

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Periode tahun 2015-2018).

Responden dalam penelitian adalah pegawai yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden latar belakang responden pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil. Metoda pengambilan data primer yang di gunakan adalah metoda kuesioner. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi berganda.

Hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) variabel akuntabilitas keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan Daerah. (2) variabel transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. (3) variabel pengawasan secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit pengelolaan keuangan Daerah. (4) variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan Daerah. (5) Secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan, dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan Daerah..

Kata kunci : Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan, Penyajian Laporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan

Abstract: This research is intended to examine whether the effect of financial accountability, transparency, supervision, and presentation of financial reports on regional financial management of the Bekasi city government (2015-2018 period).

Respondents in the study were employees who worked at the Regional Financial and Asset Management Agency of Bekasi city. The number of respondents who became the sample in this study were 100 respondents with civil servants and non-civil servants. The primary data collection method used is a questionnaire method. The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis techniques.

The results of the tests that have been carried out on the research, the following conclusions can be drawn: (1) the financial accountability

variabel has a partial effect on regional financial management. (2) the transparency variabel partially has no effect on regional financial management. (3) the variabel supervision partially does not affect the audit of regional financial management. (4) the variabel presentation of financial statements has a partial effect on regional financial management. (5) Simultaneously show that financial accountability, transparency, supervision, and presentation of financial reports on regional financial management

Keywords: *Financial Accountability, Transparency, Supervision, Presentation of Financial Statements, Financial Management*

I. PENDAHULUAN

Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba secara sederhana, Akuntansi Sektor Publik ini banyak di gunakan oleh organisasi sektor publik, seperti puskesmas, rumah sakit, masjid, partai politik, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarat dan Pemerintah pusat (Erlina, 2015). Menurut Prof. Indra Bastian Ph.D dalam modulnya yang berjudul “Lingkup Akuntansi Sektor Publik”, Akuntansi Sektor Publik dapat disimpulkan sebagai salah satu aliran dari manajemen keuangan publik, termasuk di dalamnya makroekonomi, mobilisasi pendapatan, penganggaran, realisasi anggaran, dan audit, telah dijabarkan menurut perspektif akuntansi..

Akuntansi Sektor Publik Daerah merupakan proses pengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang di perlukan oleh pihak eksternal (Dwi Ratmono 2015). Kewajiban lembaga publik memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah tersebut. Upaya Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum (Fardiana Ichalina 2019). Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti mengambil judul untuk permasalahan di atas adalah “**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI (PERIODE TAHUN 2015-2018)**”.

1.1. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis memformulasi rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?
3. Apakah Pengawasan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?

4. Apakah Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintah Kota Bekasi?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintahan Kota Bekasi.
2. Untuk Mengetahui Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah di Pemerintahan Kota Bekasi.
3. Untuk Mengetahui Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah Di Pemerintahan Kota Bekasi.
4. Untuk Mengetahui Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Bekasi.

II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2012: 10) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan menurut Badrudin (2012: 97) : APBD adalah suatu rencana kerja Pemerintah Daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran Pemerintah Daerah, baik provinsi, kabupaten, dan Kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua(PSAP BA) 02 dalam paragraph 14 dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (Tanjung, 2004:48)

2.3. Akuntabilitas Keuangan

Pengertian akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi (2008) adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelal sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Mahmudi (2010) adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

2.4. Transparansi

Pengertian transparansi menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas setara Pemerintah

dengan rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo dan Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

2.5. Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Menurut S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

2.6. Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan No. 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan pernyataan dalam PSAK No. 1 adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan” agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain.

2.7. Pengelolaan Laporan Keuangan

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah terdapat dalam (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005) bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawan terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Halim,2007:30).

2.8. Hubungan antar variabel penelitian

2.8.1. Hubungan Antara Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Menurut penelitian yang dilakukan Muhammad Alqodri (2015) dan Gerryan Putra (2017) menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H_1 : Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.8.2. Hubungan Antara Tranparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisasikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Walau komitmen dan ketentuan perundangan sudah ditetapkan untuk mengatur transparansi keuangan, masih banyak masalah dalam implementasi di lapangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqodri (2015) dan Gerryan Putra (2017) menemukan bukti empiris bahwa Transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh transparansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₂ : Transparansi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.8.3. Hubungan Antara Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah selaku pengelola keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Muhammad Alqodri (2015) memberikan bukti empiris pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah sementara penelitian yang berbeda dilakukan dalam penelitian Gerryan Putra (2017) memberikan bukti empiris variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh transparansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₃: Pengawasan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah.

2.8.5. Hubungan Antara Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan dari penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 adalah memberikan informasi mengenai:

1. Posisi keuangan
2. Kinerja keuangan

3. Arus kas entitas

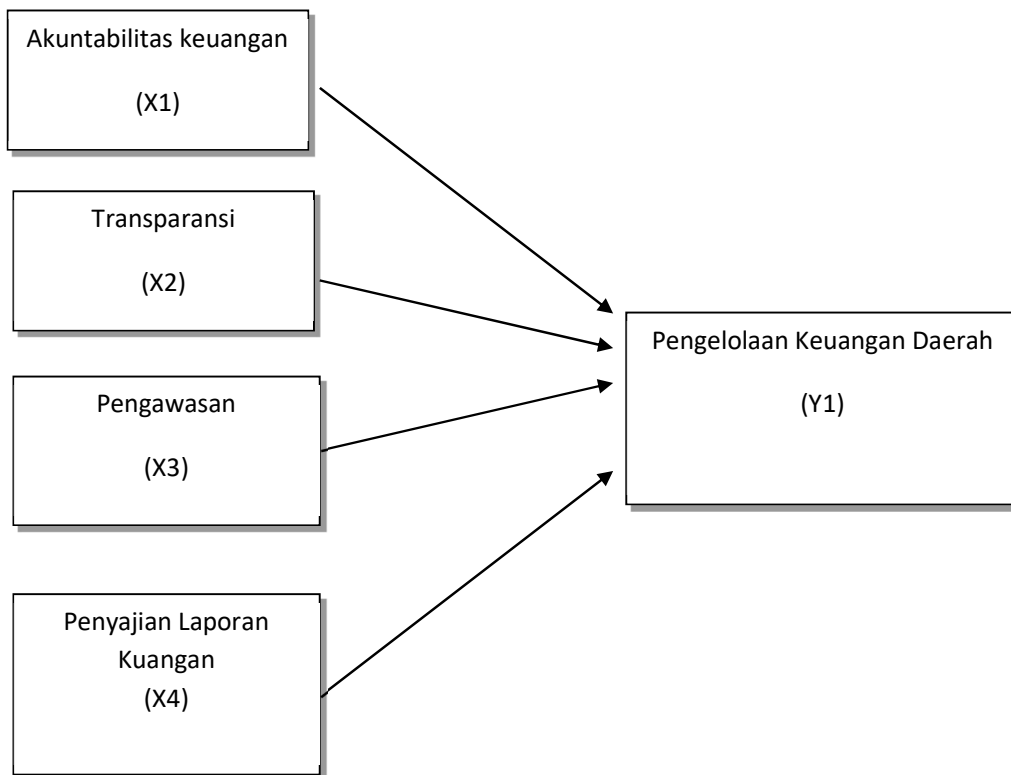
Laporan keuangan itu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dari laporan keuangan pun dapat menunjukkan dan/atau menentukan apakah kinerja manajemen itu baik atau tidak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqodri (2015) dan Salomi J. Hehanussa (2015) menemukan bukti empiris bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₄: Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.9. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

III. METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2016:37), penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisa hubungan antara empat variabel independent terhadap satu variabel dependen. Peneliti menggunakan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dari analisis pengaruh akuntabilitas keuangan, transparansi, penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan Daerah

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan laporan keuangan Daerah yaitu di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi yang berjumlah 100 responden.

Teknik pengambilan sampel di lakukan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yaitu peneliti menentukan subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pegawai badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi yang berjumlah 100 responden. Latar belakang responden pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil.

Kekuatan pada metoda ini adalah metoda yang memungkinkan terpilihnya sampel yang mempunyai bias paling sedikit serta tingkat generalisasi yang tinggi. Sedangkan kelemahan dari metoda ini adalah diperlukannya biaya yang relatif tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan penyebaran dan pengembalian kembali kuesioner yang tidak dapat dipastikan

3.3. Metoda Analisis Data

Data maupun informasi yang diterima kemudian dianalisis lebih lanjut, karena dari analisis tersebut dapat disimpulkan jawaban dari masalah pokok penelitian yang dirumuskan. Metoda analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

3.3.1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali,2016:19).

Gambaran umum mengenai karakteristik responden dijelaskan dengan tabel statistik deskriptif responden yang diukur dengan skala ukur interval yang menjelaskan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, pendidikan terakhir, sedangkan untuk memberikan deskriptif mengenai variabel independen penelitian yaitu akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan keuangan.

Sedangkan variabel dependen penelitian yaitu pengelolaan keuangan Daerah, dijelaskan dengan tabel statistik deskriptif variabel yang menunjukkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

3.3.2. Uji Kualitas Data

3.3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid
2. Bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid

3.3.2.2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016:47). Pengukuran

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2016:48).

3.3.3. Uji asumsi klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal P-PPlots.

3.3.3.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonieritas adalah *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 ,

3.3.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas (Ghozali, 2016:134). Untuk mengidentifikasi ada atau tidak heteroskedastisitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

3.3.4. Analisa Statistik Data

3.3.4.1. Analisa Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini digunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Metoda analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), yaitu regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:94). Regresi berganda digunakan untuk menguji H_1, H_2, H_3, H_4 dengan pendekatan interaksi yang bertujuan untuk memenuhi ekspektasi peneliti mengenai pengaruh akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan Daerah persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Dimana:

Y : Pengelolaan Keuangan Daerah

a : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi

X1 : Akuntabilitas Keuangan

X2 : Transparansi

X3 : Pengawasan

X4 : Penyajian laporan keuangan

3.3.4.2. Pengujian Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($Sig < 0,05$), maka secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($Sig > 0,05$), maka secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.4.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan pada pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Daerah objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertempat di Kantor WaliKota Bekasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung dengan mendatangi responden yang bekerja pada BPKAD di wilayah Kota Bekasi. Peneliti telah menyebar kuesioner sebanyak 100 ke BPKAD Kota Bekasi

Pada penelitian ini, dari 100 kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner kembali sedangkan kuesioner yang tidak kembali tidak ada. Sehingga kuesioner yang lengkap dan dapat diolah sebanyak 100. Gambaran mengenai data ini sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	100	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak disebar	-	-
3	Jumlah kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap	-	-
	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data diolah penulis (2020)

4.2. Karakteristik Profil Responden

Karakteristik-karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dalam BPKAD di wilayah Kota Bekasi Jawa Barat.

4.2.1. Jenis Kelamin

Pengelompokan responden menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	61	61%
Perempuan	39	39%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah penulis (2020)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 61 orang atau 61% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 39 orang atau 39%.

4.2.1. Usia Responden

Pengelompokan responden menurut usia dapat dilihat dalam Tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Data Statistik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase
21-30 Tahun	59	59%
31-40 Tahun	38	38%
>40 tahun	3	3%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah penulis (2020)

Tabel 4.3 menunjukkan usia 21-30 tahun mendominasi yaitu sebanyak 59 orang atau 59%. Sedangkan 31-40 tahun berjumlah 38 orang atau 38% sisanya usia 40 tahun keatas berjumlah 3 orang atau 3%.

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Pengelompokan responden menurut tingkat Pendidikan dalam dilihat dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4 Data Statistik Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Presentase
D3	6	6%
S1	69	69%
S2	23	23%
S3	2	2%
Total	100	100%

Sumber: Data yang diolah penulis (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar berpendidikan Diploma Tiga (D3) sebanyak 6 orang atau 6% sedangkan Strata Satu (S1) sebanyak 69 orang atau 69% yang berpendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 23 orang atau 23% dan Strata Tiga (S3) sebanyak 2 orang atau 2%

4.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2015:207-208). Statistik ini bertujuan menganalisis data berdasarkan hasil yang diperoleh dari jawaban responden. Analisis deskriptif dapat dilihat dari Tabel 4.5

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Keuangan	100	16	25	21.44	2.306
Transparansi	100	24	45	36.32	5.170
Pengawasan	100	29	45	37.72	4.358
Penyajian Laporan Keuangan	100	21	35	28.84	3.910
Pengelolaan Keuangan Daerah	100	25	40	33.08	3.907
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS 25, 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 menyatakan variabel akuntabilitas keuangan (X_1) memiliki nilai minimum 16 dan maksimum 25 hal ini menunjukkan dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan paling kecil berjumlah 16 dan paling besar berjumlah 25. Rata-rata (mean) variabel akuntabilitas keuangan sebesar 21,44 dan standar deviasi sebesar 2,306. Variabel transparansi (X_2) menunjukkan nilai minimum 24 dan maksimum 45 hal ini menunjukkan bahwa Transparansi paling kecil berjumlah 24 dan paling besar 45. Rata-rata (mean) variabel Transparansi sebesar 36,32 dan standard deviasi sebesar 5,170.

Variabel pengawasan (X_3) menunjukkan nilai minimum 29 dan maksimal 45 hal ini menunjukkan bahwa pengawasan paling kecil berjumlah 29 dan paling besar 45. Rata-rata (mean) variabel Pengawasan sebesar 37,72 dan standard deviasi sebesar 4,358. Variabel Penyajian laporan keuangan (X_4) menunjukkan nilai minimum 21 dan nilai maksimum 35 hal ini menunjukkan dalam hal penyajian laporan keuangan paling kecil 21 dan paling besar 35. Rata-rata (mean) variabel penyajian laporan keuangan sebesar 28,84 dan standard deviasi 3,910. Variabel pengelolaan keuangan daerah (Y) menunjukkan nilai minimum 25 dan nilai maksimum 40 hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan Daerah paling kecil berjumlah 25 dan paling besar berjumlah 40. Rata-rata (mean) variabel Pengelolaan keuangan Daerah sebesar 33,08 dan standar deviasi sebesar 3,907.

4.4. Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1. Hasil Uji Validasi

Uji validitas dari instrument penelitian ini dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau t_{hitung} dari nilai jawaban setiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Dimana nilai t_{tabel} untuk $N=100$ pada signifikansi 5% adalah 0,1966 dengan derajat bebas $100-2=98$ setiap butir pertanyaan atau indikator dikatakan valid bila angka kolerasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan t_{tabel} (Ghozali,2016:53). Berdasarkan dari hasil pengujian didapati hasil bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi $r_{hitung} > t_{tabel}$. Tebel dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Akuntabilitas Keuangan dengan 100 sampel responden.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validasi Akuntabilitas Keuangan (X_1)

VARIABEL		AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	TOTAL
AK1	Pearson Correlation	1	.270**	.402**	.240*	.378**	.668**
AK2	Pearson Correlation	.270**	1	.275**	-.030	.228*	.502**
AK3	Pearson Correlation	.402**	.275**	1	.369**	.462**	.761**
AK4	Pearson Correlation	.240*	-.030	.369**	1	.365**	.622**
AK5	Pearson Correlation	.378**	.228*	.462**	.365**	1	.747**
TOTAL	Pearson Correlation	.668**	.502**	.761**	.622**	.747**	1

Sumber: Otput SPSS (2020)

**Tabel 4.7 Case Processing Summary
Transparansi**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variabels in the procedure.

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan hasil bahwa variabel akuntabilitas keuangan memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 0,1966 dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Sehingga semua butir pertanyaan didalam variabel akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X₂)

VARIABE;		TR1	TR2	TR3	TR4	TR5	TR6	TR7	TR8	TR9	TOTAL
TR1	Pearson Correlation	1	.529**	.228*	.372**	.372**	.247*	.690**	.500**	.150	.689**
TR2	Pearson Correlation	.529**	1	.528**	.470**	.277**	.261**	.599**	.450**	.326**	.742**
TR3	Pearson Correlation	.228*	.528**	1	.465**	.215*	.527**	.391**	.338**	.303**	.666**
TR4	Pearson Correlation	.372**	.470**	.465**	1	.292**	.210*	.388**	.451**	.445**	.686**
TR5	Pearson Correlation	.372**	.277**	.215*	.292**	1	.293**	.385**	.279**	.198*	.554**
TR6	Pearson Correlation	.247*	.261**	.527**	.210*	.293**	1	.365**	.202*	.328**	.566**
TR7	Pearson Correlation	.690**	.599**	.391**	.388**	.385**	.365**	1	.655**	.329**	.806**
TR8	Pearson Correlation	.500**	.450**	.338**	.451**	.279**	.202*	.655**	1	.386**	.713**
TR9	Pearson Correlation	.150	.326**	.303**	.445**	.198*	.328**	.329**	.386**	1	.569**
TOTAL	Pearson Correlation	.689**	.742**	.666**	.686**	.554**	.566**	.806**	.713**	.569**	1

Sumber: Output SPSS (2020)

Tabel 4.9 Case Processing Summary
Transparansi

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variabels in the procedure.

Sumber: Output SPSS (2020)

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel Transparansi memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari t_{hitung} yaitu 0,1966 dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Sehingga semua butir pertanyaan untuk variabel Transparansi dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

Tabel 4.10 Hasil Uji Validasi Variabel Pengawasan (X₃).

VARIABEL		PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	PA9	TOTAL
PA1	Pearson Correlation	1	.314**	.187	.314**	.264**	.352**	.345**	.418**	.449**	.572**
PA2	Pearson Correlation	.314**	1	.400**	1.000*	.402**	.546**	.577**	.494**	.463**	.803**
PA3	Pearson Correlation	.187	.400**	1	.400**	.854**	.318**	.177	.401**	.370**	.636**
PA4	Pearson Correlation	.314**	1.000*	.400**	1	.402**	.546**	.577**	.494**	.463**	.803**
PA5	Pearson Correlation	.264**	.402**	.854**	.402**	1	.431**	.237*	.436**	.464**	.698**

**PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI (PERIODE TAHUN 2015-2018)**

PA6	Pearson Correlation	.352**	.546**	.318**	.546**	.431**	1	.388**	.231*	.235*	.627**
PA7	Pearson Correlation	.345**	.577**	.177	.577**	.237*	.388**	1	.603**	.607**	.702**
PA8	Pearson Correlation	.418**	.494**	.401**	.494**	.436**	.231*	.603**	1	.972**	.793**
PA9	Pearson Correlation	.449**	.463**	.370**	.463**	.464**	.235*	.607**	.972**	1	.789**
TOTAL	Pearson Correlation	.572**	.803**	.636**	.803**	.698**	.627**	.702**	.793**	.789**	1

**Tabel 4.11 Case Processing Summary
Pengawasan**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variabels in the procedure.

Sumber: Output SPSS (2020)

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel pengawasan memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari t_{hitung} yaitu 0,1966 dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Sehingga semua butir pertanyaan untuk variabel pengawasan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

Tabel 4.12 Hasil Validasi Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X₄)

VARIABEL		PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	TOTAL
PL1	Pearson Correlation	1	.468**	.498**	.526**	.339**	.282**	.363**	.660**
PL2	Pearson Correlation	.468**	1	.446**	.520**	.559**	.434**	.577**	.764**
PL3	Pearson Correlation	.498**	.446**	1	.584**	.446**	.403**	.575**	.759**
PL4	Pearson Correlation	.526**	.520**	.584**	1	.527**	.398**	.474**	.776**
PL5	Pearson Correlation	.339**	.559**	.446**	.527**	1	.363**	.582**	.734**
PL6	Pearson Correlation	.282**	.434**	.403**	.398**	.363**	1	.647**	.687**
PL7	Pearson Correlation	.363**	.577**	.575**	.474**	.582**	.647**	1	.817**
TOTAL	Pearson Correlation	.660**	.764**	.759**	.776**	.734**	.687**	.817**	1

Sumber: Output SPSS (2020)

**Tabel 4.13 Case Processing Summary Penyajian
Laporan Keuangan**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variabels in the procedure.

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari t_{hitung} yaitu 0,1966 dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Sehingga semua butir pertanyaan untuk variabel penyajian laporan keuangan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

Tabel 4.14 Hasil Uji Validasi Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

VARIABEL		PK1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	PK8	TOTAL
PK1	Pearson Correlation	1	.487**	.321**	.314**	.311**	.570**	.311**	.422**	.688**
PK2	Pearson Correlation	.487**	1	.457**	.321**	.193	.469**	.265**	.339**	.665**
PK3	Pearson Correlation	.321**	.457**	1	.418**	.303**	.508**	.390**	.400**	.702**
PK4	Pearson Correlation	.314**	.321**	.418**	1	.463**	.222*	.096	.448**	.605**
PK5	Pearson Correlation	.311**	.193	.303**	.463**	1	.457**	.249*	.536**	.640**
PK6	Pearson Correlation	.570**	.469**	.508**	.222*	.457**	1	.580**	.470**	.779**
PK7	Pearson Correlation	.311**	.265**	.390**	.096	.249*	.580**	1	.487**	.610**
PK8	Pearson Correlation	.422**	.339**	.400**	.448**	.536**	.470**	.487**	1	.751**
TOTAL	Pearson Correlation	.688**	.665**	.702**	.605**	.640**	.779**	.610**	.751**	1

Sumber: Output SPSS (2020)

Tabel 4.15 Case Processing Summary
Pengelolaan keuangan Daerah

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Sumber: Output SPSS (2020)

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan Daerah memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari t_{hitung} yaitu 0,1966 dengan tingkat signifikan $< 0,05$. Sehingga semua butir pertanyaan untuk variabel pengelolaan keuangan Daerah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai item yang valid.

4.3.2. Hasil Uji Realibilitas

Uji realibilitas dapat dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan kevaliditasnya. Uji realibilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat ukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi realibilitas suatu alat ukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila jika hasil *Alpha Cronbach* $> 0,70$ (Ghozali, 2016). Pada Tabel 4.15 akan menunjukkan hasil dari variabel akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan keuangan.

Tabel 4.16 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas Coefficient	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas keuangan (X1)	5 butir pertanyaan	0,762	Realiabel
Transparansi (X2)	9 butir pertanyaan	0,764	Realiabel
Pengawasan (X3)	9 butir pertanyaan	0,773	Realiabel

Penyajian laporan keuangan (X4)	7 butir pertanyaan	0,783	Realiabel
Pengelolaan keuangan Daerah (Y)	8 butir pertanyaan	0,767	Realiabel

Sumber: Output SPSS (2020)

Dalam Tabel 4.16 menunjukkan nilai *Cronbach alpha* atas variabel akuntabilitas keuangan sebesar 0,762, variabel transparansi sebesar 0,764, variabel pengawasan sebesar 0,773, variabel penyajian laporan keuangan 0,783, variabel pengelolaan keuangan Daerah sebesar 0,767. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam variabel ini reliabel karena semua mempunyai nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,70. Dalam hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan disetiap instrumen penelitian akan mampu memperoleh data yang konsisten.

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Hasil Uji Normalitas

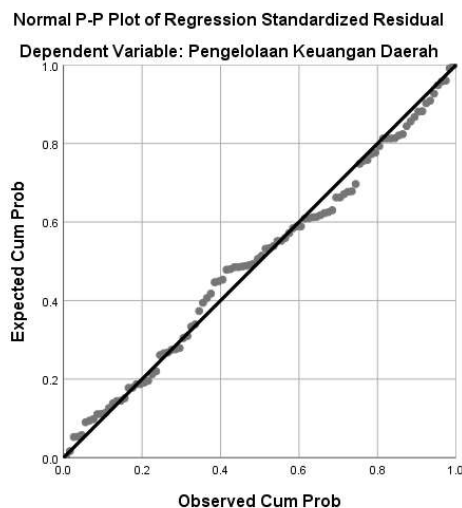
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*).

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafis. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distriusi normal yang mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

a. Hasil uji normalitas secara grafik

Dasar pengambilan keputusan analisis, jika menyebar disekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:156). Dalam Gambar 4.1 menunjukkan hasil hasil dari uji normalitas grafik P-Plot :

Gambar 4.1 Hasil uji normalitas



Pada grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran data yang berada diatas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Smirnov (K-S)*

Tabel 4.17 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.32919744
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.058
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menyimpulkan bahwa nilai seluruh variabel kolmogrov smirnov $> 0,05$ yang terlihat pada asymp.sig. (2-tailed) yaitu 0,200. Dengan demikian residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2. Hasil uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (indepneden). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Jika nilai tolerance $< 0,1$ dan VIF > 10 dan maka terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2016:105). Berikut ini hasil pengujian multikolonieritas:

Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.960	3.790		3.155	.002		
	Akuntabilitas Keuangan	.339	.170	.200	2.001	.048	.763	1.310
	Transparansi	.043	.076	.057	.566	.573	.757	1.321
	Pengawasan	.080	.101	.090	.798	.427	.605	1.652
	Penyajian Laporan Keuangan	.321	.107	.321	2.999	.003	.667	1.500
a. Dependent Variabel: Pengelolaan Keuangan Daerah								

Sumber: Output SPSS (2020)

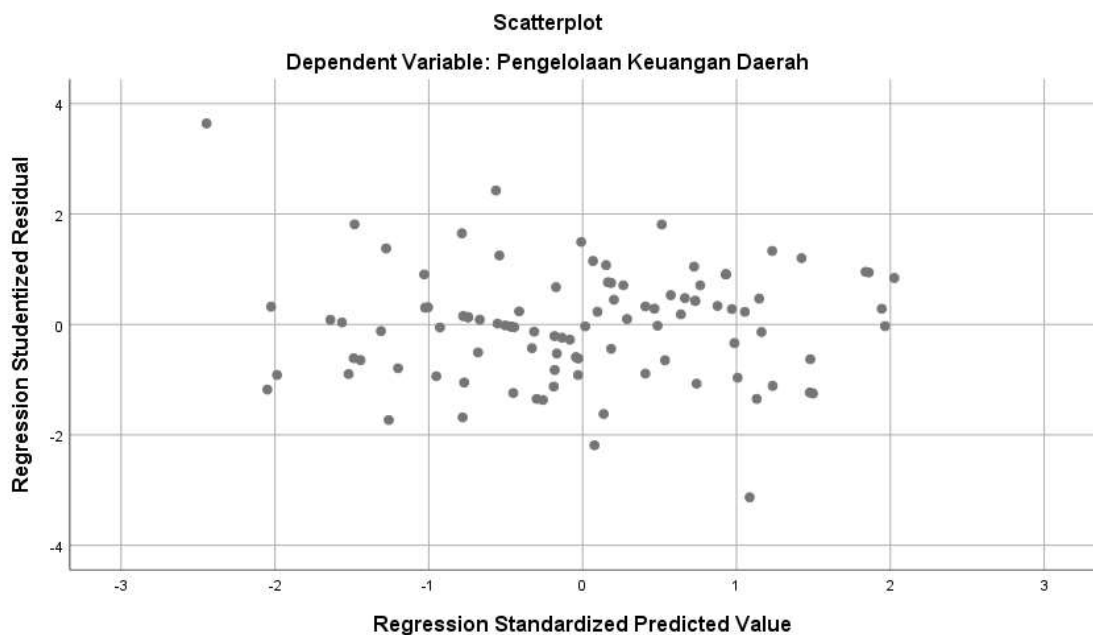
Berdasarkan Tabel 4.18 diatas menunjukan bahwa variabel akuntabilitas keuangan mempunyai nilai VIF sebesar 1,310, variabel transparansi mempunyai nilai VIF sebesar 1,321, variabel pengawasan mempunyai nilai VIF sebesar 1,652, variabel penyajian laporan keuangan mempunyai nilai VIF sebesar 1,500. Dalam tabel diatas juga

menyimpulkan bahwa keempat variabel memiliki nilai tolerance diatas 0,10. Sehingga dapat di simpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.5.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat grafik plot nilai yang diprediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisis ini jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas.

Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.2. menunjukkan bahwa data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Artinya banyak terjadi heteroskedastisitas dibandingkan dengan homokedastisitas.

4.6. Hasil analisis statistik data

4.6.1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui signifikan pengaruh akuntabilitas keuangan (X_1), transparansi (X_2), pengawasan (X_3), dan penyajian laporan keuangan (X_4), terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y), apakah masing-masing variabel berpengaruh positif atau negatif. Berikut ini hasil uji analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.19 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	11.960	3.790	

Akuntabilitas Keuangan (X1)	.339	.170	.200
Transparansi (X2)	.043	.076	.057
Pengawasan (X3)	.080	.101	.090
Penyajian Laporan Keuangan (X4)	.321	.107	.321

Sumber: Output SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.19 diatas diperoleh hasil seperti diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,960 + 0,339X_1 + 0,043X_2 + 0,080X_3 + 0,321X_4 + e$$

Persamaan regresi diatas diperoleh nilai-nilai konstanta sebesar 11,960. Yang mempunyai arti bahwa jika variabel independen akuntabilitas keuangan (X_1), transparansi (X_2), pengawasan (X_3), dan penyajian laporan keuangan (X_4), dianggap konstan atau bernilai 0 (nol), maka pengelolaan keuangan Daerah akan meningkat sebesar 11,960.

Koefisien regresi pada variabel akuntabilitas keuangan (X_1) memiliki nilai sebesar 0,339 yang mempunyai arti bahwa pengaruh akuntabilitas keuangan (X_1) terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y) adalah positif. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap akuntabilitas keuangan (X_1) akan mengalami peningkatan pengelolaan keuangan sebesar 0,339 dengan asumsi variabel transparansi (X_2), pengawasan (X_3), dan penyajian laporan keuangan (X_4) konstan.

Koefisien regresi pada variabel transparansi (X_2) memiliki nilai sebesar 0,043 yang mempunyai arti bahwa pengaruh transparansi (X_2) terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y) adalah positif. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap transparansi (X_2) akan mengalami peningkatan pengelolaan keuangan Daerah (Y) sebesar 0,043 dengan asumsi variabel akuntabilitas keuangan (X_1), pengawasan (X_3), dan penyajian laporan keuangan (X_4) konstan.

Koefisien regresi pada variabel pengawasan (X_3) memiliki nilai sebesar 0,080 yang mempunyai arti bahwa pengaruh pengawasan (X_3) terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y) adalah positif. Hal ini mengidentifikasi bahwa setiap pengawasan (X_3) akan mengalami peningkatan pengelolaan keuangan Daerah (Y) sebesar 0,080 dengan asumsi variabel akuntabilitas keuangan (X_1), transparansi (X_2), dan penyajian laporan keuangan (X_4) konstan.

Koefisien regresi pada variabel penyajian laporan keuangan (X_4) memiliki nilai sebesar 0,321 yang mempunyai arti bahwa pengaruh penyajian laporan keuangan (X_4) terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y) adalah positif. Hal ini mengidentifikasi bahwa penyajian laporan keuangan (X_4) akan mengalami peningkatan terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y) sebesar 0,321 dengan asumsi variabel akuntabilitas keuangan (X_1), transparansi (X_2), pengawasan (X_3) konstan.

4.6. Hasil Uji Hipotesis

4.6.1. Hasil Uji t (Parsial)

Hasil uji statistik t digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independent yaitu akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan keuangan apakah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Berikut ini adalah hasil dari uji t.

Tabel 4.20 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, TRANSPARANSI, PENGAWASAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI (PERIODE TAHUN 2015-2018)

1	(Constant)	11.960	3.790		3.155	.002		
	Akuntabilitas Keuangan (X1)	.339	.170	.200	2.001	.048	.763	1.310
	Transparansi (X2)	.043	.076	.057	.566	.573	.757	1.321
	Pengawasan (X3)	.080	.101	.090	.798	.427	.605	1.652
	Penyajian Laporan Keuangan (X4)	.321	.107	.321	2.999	.003	.667	1.500
a. Dependent Variabel: Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)								

Sumber: Output SPSS (2020)

Kriteria dalam uji t (parsial) dapat dilihat berdasarkan uji hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , yaitu:

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $sig \geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{tabel} dengan taraf nyata = 5%; $df = n - k - 1$
 = 100-3-1
 = 96

Maka $t_{tabel} = 1,98498$

Berikut ini adalah hasil pengujian secara parsial yang meliputi akuntabilitas keuangan (X_1), transparansi (X_2), pengawasan (X_3), dan penyajian laporan keuangan (X_4) terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y):

1. Variabel akuntabilitas keuangan (X_1) $0,048 < 0,05$ dan $2,001 > 1,98498$ maka disimpulkan variabel akuntabilitas keuangan (X_1) secara parsial mempengaruhi pengelolaan keuangan Daerah (Y).
2. Variabel transparansi (X_2) $0,573 > 0,05$ dan $0,566 < 1,98498$ maka disimpulkan bahwa variabel tranparansi (X_2) secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y).
3. Variabel pengawasan (X_3) $0,427 < 0,05$ dan $0,798 < 1,98498$ maka disimpulkan bahwa variabel pengawasan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y).
4. Variabel penyajian laporan keuangan (X_4) $0,003 < 0,05$ dan $2,999 > 1,98498$ maka disimpulkan variabel penyajian laporan keuangan (X_4) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Y).

4.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa besar kemampuan variabel independent yaitu akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan keuangan dalam menjalankan variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan Daerah. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.21 yang menyajikan hasil koefisien determinasi untuk variabel Y, X_1 , X_2 , X_3 , X_4 :

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.523 ^a	.274	.243	3.399
a. Predictors: (Constant), Penyajian Laporan Keuangan (X4), Akuntabilitas Keuangan (X1), Transparansi (X2), Pengawasan (X3)				
b. Dependent Variabel: Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)				

Sumber: Output SPSS (2020)

Berdasarkan Tabel 4.21 diatas, menunjukkan nilai koefisien adjusted R square yaitu sebesar 0,243 atau 24,3%. Maka dapat menyimpulkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan (X₁), transparansi (X₂), pengawasan (X₄) adalah sebesar 24,3%.

Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.20 diatas sebesar 0,523 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen antara variabel dependen adalah kuat karena memiliki koefisien diatas 0,05. Standar error of the estimate (SEE) sebesar 3.399 semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.6. Interpretasi Hasil Penelitian

4.6.1. Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,048 mempunyai arti yaitu lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ semakin tingginya hasil akuntabilitas keuangan maka semakin tinggi pula pengelolaan keuangan Daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gerryan putra (2017) yang berpendapat bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dengan pengelolaan keuangan Daerah.

4.6.2. Transparansi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki nilai signifikan sebesar 0,573 mempunyai arti yaitu lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian semakin tingginya transparansi maka tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rizky rasmana hanafiah (2016) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengetahui proses pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi, padahal BPKAD Kota Bekasi telah menyediakan akses berupa website. Tetapi masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengakses mengenai transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bekasi baik melalui media elektronik maupun media lainnya. Namun, hal ini juga dapat disebabkan karena akses untuk memperoleh informasi yang berbelit-belit sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara mengakses website tersebut. Jadi, variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah karena kurangnya partisipasi masyarakat atau dapat juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Bekasi mengenai cara mengakses laporan keuangan Daerah di Kota Bekasi.

4.6.3. Pengawasan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa pengawasan memiliki nilai signifikan sebesar 0,427 mempunyai arti yaitu lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian semakin tingginya pengawasan maka tidak akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Alqodri (2015) yang berpendapat bahwa pengawasan tidak berpengaruh dengan pengelolaan keuangan Daerah.

4.6.5. Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 mempunyai arti yaitu lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ semakin tingginya hasil penyajian laporan keuangan maka semakin tinggi pula pengelolaan keuangan Daerah yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salomi J. Hehanussa (2017) yang berpendapat bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dengan pengelolaan keuangan Daerah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengolahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi (periode 2015-2018). Hal ini karena Pemerintah Daerah telah melaksanakan musrenbang (musyawarah perencanaan dan pembangunan) yang melibatkan semua unsur masyarakat. Tidak hanya itu Pemerintah mampu menjelaskan, menjawab, dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Sehingga masyarakat dapat melihat kinerja Pemerintah dan percaya apa yang dilakukan Pemerintah.
2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi (periode 2015-2018). Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengetahui proses pengelolaan keuangan Daerah, padahal BPKAD Kota Bekasi telah menyediakan website untuk mengakses mengenai transparansi pengelolaan keuangan Daerah. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum akses website tersebut. Namun, hal ini juga dapat disebabkan karena akses untuk memperoleh informasi yang masih berbelit-belit sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham untuk mengaksesnya.
3. Pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi (periode 2015-2018). Hal ini disebabkan karena tingkat pengawasan yang tinggi akan membuat pegawai maupun pimpinan mengalami tekanan dalam menjalankan tugasnya. Tekanan membuat seseorang tidak tenang dan santai dalam menjalankan tugasnya karena selalu diawasi. Sebaiknya pengawasan dilakukan sewajarnya dan mengikuti peraturan yang ada.
4. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah di Pemerintahan Kota Bekasi (2015-2018). Hal ini mengartinya bila penyajian laporan keuangan di sajikan dengan tersistem, terkontrol, dan dilakukan

sesuai peraturan yang berlaku akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah di Kota Bekasi mengenai akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan terhadap pengelolaan keuangan Daerah untuk kedepannya. Supaya kedepannya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Pemerintah sehingga akan terciptanya Pemerintah yang baik dan tata kelola Pemerintah yang bagus khususnya di pemerintahan Kota Bekasi.
2. Bagi satuan kerja perangkat Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menabuh pengetahuan dan ilmu responden pada khususnya mengenai akuntabilitas keuangan, transparansi, pengawasan dan penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang berada di Kota Bekasi. Informasi ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa organisasi sektor Pemerintah tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Berdasarkan penelitian diatas yang mempunyai keterbatasan maka disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik pengambilan data yang lain tidak hanya menggunakan metoda survey (kuesioner) untuk memperoleh data namun bisa juga menggunakan metoda wawancara agar penelitian selanjutnya bisa lebih sempurna. esama auditor) dalam tim akan memberikan kualitas audit yang maksimal untuk dihasilkan.

5.1. Keterbatasan dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

1. Pada saat penyebaran kuesioner terhalang oleh adanya wabah covid-19 yang membuat pegawai dalam BPKD Kota Bekasi banyak yang bekerja dari rumah atau WFH yang mengakibatkan pengumpulan data cukup lama.
2. Penelitian ini hanya menggunakan metoda kuesioner disarankan untuk peneliti selanjutnya bisa ditambah dengan wawancara agar hasil lebih sempurna dan hasil penelitian lebih kuat.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu akuntabilitas keuangan (X_1), transparansi (X_2), pengawasan (X_3), dan penyajian laporan keuangan (X_4), dan 1 variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan Daerah (Y). kemungkinan masih ada lagi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan Daerah

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim. et al. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alqodri, Muhammad. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Dumai)*.
- Ar.Mustopadjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementas, dan Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifyadi, Teguh SH, 2008. *Konsep Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP (2000) *Akuntabilitas dan Good governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Bogor Agricultural University (IPB).

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Djalil, M.A. et al. 2017. The Effect Of Monitoring, Information System And Government Accounting Standard on Quality Of Regional Financial Report Of Government Agencies (SKPK) At Central Aceh District Province Of Aceh Indonesia. *International Journal of Social Science and Economic Research*, Vol 2, 4865-4876.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivaiate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafiah, Rasmana, Rizky. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah* (Studi di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara).
- Hehanussa, J, Salomi. 2015. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. Vol 2, 2303-9791.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Krintenta. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Pasal 1) Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 (Pasal 1) Tentang Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2007 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Ratmono, Dwi. (2015). *"Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua"*. Yogyakarta: Cetakan Pertama UPP STIM YKPN.
- Sadu Wasistiono, 2007 *desentralisasi, demokratisasi, dan pembentukan good governance*
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance (KePemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I*, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Simbolon, Anthon. (2006). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UGM.
- Simbolon, Maringan masry. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sriwijayanti, (2018), *Analaisis pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan Daerah terhadap pengelolaan APBD* (Studi persepsi pengelola APBD SKPD dinas Pemerintah Kota Padang)
- Sugiyono. (2017). *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahudin abi et al, (2018), *Determinat Of Regional Financial Management Accountability And its consequences to the stakeholder trus: a study at regional government in*

Dompu, Indonesia. *International journal of economics, commerce and management*, Vol IV, 2348-0386.

Yohanes. Yahya. (2006) *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.